

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah.

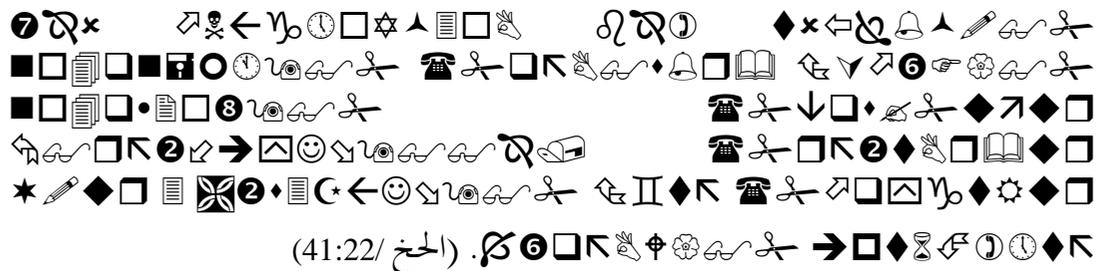
Memperhatikan konsep dijadikannya manusia sebagai *khalifah* di muka bumi tersebut tidak lain adalah sebagai perlambang bahwa memang mempunyai potensi untuk menempati tempat tertinggi, sehingga ia terpuji sebagai makhluk. <sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 30:



Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. (Q.S. Al-Baqarah: 30).

Menurut M. Quraish Shihab, bahwa konsep dijadikannya manusia khalifah itu sendiri pada dasarnya adalah untuk siapa saja yang diberi kekuasaan mengelola wilayah (negara), dengan misi adalah untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya dalam mensejahterakan umat manusia. <sup>2</sup> Firman Allah dalam surah al-Hajj ayat 41 :



<sup>1</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqih Siyashah: Konsep, Aliran dan Tokoh-tokoh Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 20.

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), Cet. VII, hlm. 157.

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka itu mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh untuk berbuat *ma'ruf* (kebaikan) dan mencegah yang perbuatan *munkar* dan kepada Allah-lah hanya kembalinya segala urusan". (Q.S. Al-Hajj: 41).

Menurut ayat tersebut, orang yang diberikan Allah kekuasaan untuk memerintah, baik dengan sebutan *khalifah*, sultan, raja, *imam* atau *amir*, maka sudah seharusnya mereka menjadai teladan dalam beribadah, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Begitu juga halnya dengan tugas yang diberikan kepada mereka dalam hal pengelolaan negara pada intinya adalah agar terjaminnya kemaslahatan rakyat, harus bertanggung jawab dan jujur, sebagaimana dimaksudkan hadis berikut :

عن معقل احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الا لم يجد رائحة الجنة. (رواه البخارى عن معقل).<sup>3</sup>

Artinya: Dari Ma'qil ra. katanya: saya akan menceritakan kepada engkau hadis yang saya dengar dari Rasulullah saw. dan saya telah mendengar beliau bersabda: seorang yang telah ditugaskan Tuhan mematuhi (mengatur urusan) rakyat, kalau dia tidak memimpin rakyat itu dengan jujur, niscaya dia tidak akan memperoleh bau surga". (HR. Bukhari).<sup>4</sup>

Memahami hadis tersebut, pengelolaan suatu wilayah atau negara, dan orang yang diberikan tugas untuk mengelolanya (khalifah, pemimpin, imam, kepala negara, raja) mempunyai peranan vital yaitu bagi kokohnya sebuah bangsa dan mensejahterakan rakyatnya. Disisi lain, bagi rakyat juga dituntut peran sertanya untuk membantu pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan Islam,

---

<sup>3</sup>Abu Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Jilid IV, h. 145.

<sup>4</sup>Zainuddin Hamidy, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Malaysia: Klang book Centre, 1997), Jilid IV, hlm. 177.

seperti kewajiban mentaatinya, mematuhi, bekerja dengan baik, dan taatnya menjalankan ajaran agama.

Pentingnya peran pemerintahan, rakyat dan penerapan ajaran agama terutama dalam menciptakan keberhasilan tugas sebagai khalifah untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan: dunia itu adalah ladang akhirat, agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Penguasa dan agama adalah kembaran, karena agama merupakan tiang, sedangkan penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak punya tiang akan roboh dan sesuatu tidak dijaga akan hilang.<sup>5</sup>

Disisi lain, al-Qur'an tidak menentukan bentuk mengenai cara dan prosedur politik yang konkrit harus ditempuh untuk dilaksanakan oleh umat Islam, maka sejak awal kaum muslimin mengembangkan sistem politik mereka hanya atas dasar inspirasi dari beberapa ajaran dari al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian praktik politik dan pemerintahan umat Islam sesungguhnya lebih merupakan rangkaian proses penafsiran dan akomodasi ajaran dan realitas sosial politik yang ada dengan tujuan akhir terciptanya sistem sosial masyarakat yang komprehensif.

Tidak heran dari dulu sampai sekarang, ternyata para tokoh Islam lebih senang dalam perdebatan tentang politik dan pemerintahan yang ternyata belum tuntas sampai sekarang ini dan nyatanya masih hangat didalam kancah pemikiran komunitas masyarakat Islam. Lebih dari itu, dalam kancah pemikiran politik Islam, pada umumnya masalah politik merupakan produk “perdebatan besar”.

---

<sup>5</sup>Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Jlid 1, hlm.17.

Dari perdebatan tersebut kemudian timbullah seperti Sayyid Quthub, Muhammad Rasyid Ridha dan Abul A'la al-Maududi yang berpandangan bahwa Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek bidang kehidupan manusia termasuk juga membahas persoalan bidang politik dan bernegara.<sup>6</sup>

Disisi lainnya seperti Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein berpendapat: Islam hanyalah sebuah agama dan tidak ada kaitannya dengan persoalan politik dan negara (pemerintahan), dan Muhammad saw. tidak bermaksud untuk berpolitik dan mendirikan negara dan ini bukan termasuk bagian dari risalahnya, yang bertugas melaksanakan dakwah secara sempurna atau murni<sup>7</sup> Atau pakar Muhammad Husein Haikal menolak kedua pendapat tersebut dan berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat politik dan sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bangsa.<sup>8</sup>

Para pemikir tersebut pada dasarnya hanya memberikan konsep-konsepnya saja tentang bernegara, tanpa memberikan solusi yang tepat bagaimana membangun sebuah sistem negara yang tepat untuk mensejahterakan rakyatnya dan sistem masyarakat baik, sehingga negara dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya

Menunjukkan bahwa tinggi rendahnya, berhasil atau tidaknya mengupayakan kesejahteraan masyarakat sangat mempengaruhi kehidupan suatu

---

<sup>6</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.1.

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1999), hlm.29.

<sup>8</sup>Munawir Sjadzali, *Op.Cit*, hlm.224.

negara. Di samping itu, kondisi suatu negara yang baik, stabil dan kondusif akan sangat dipengaruhi oleh sistem kehidupan masyarakatnya.

Namun kalau diperhatikan lebih jauh, ternyata para pemikir Islam tersebut ternyata tidak menyentuh persoalan-persoalan mendasar dalam mensejahterakan masyarakat di suatu negara ini. Bahkan ternyata mereka lebih banyak berdebat urusan bentuk negara atau ada tidaknya konsep negara dalam Islam.

Namun memperhatikan di antara tokoh besar tersebut, salah seorang pemikir Islam, yaitu Al-Mawardi (Abdul Hasan Ali Al-Basri Al-Mawardi) ternyata mempunyai pemikiran sendiri tentang pentingnya membangun negara sejahtera agar rakyat sejahtera, terutama mengenai pondasi dasar dalam membangunnya maupun konsep dasar negaranya. Jadi, penting sekali memperhatikan dan menerapkannya, karena akan sangat menentukan keutuhan suatu negara bersangkutan.

Jika kondisi suatu negara baik dan kondusif, dan sumber daya alamnya yang kaya, maka merupakan modal dasar untuk menuju kesejahteraan rakyat. Adapun jika sumber daya alamnya miskin, sebenarnya tidak terlalu berarti dan berpengaruh bagi masyarakat selama kondisi sosial negara itu baik dan kondusif. Bila sumber daya alam itu kaya, sedang kondisi negara kondusif, maka akan mensejahterakan rakyat. Sebaliknya, jika kondisi negara itu miskin, rakyat akan masih mampu hidup sejahtera.<sup>9</sup>

Adapun pondasi dasar yang harus ada dalam membangun negara sejahtera, yang harus dilaksanakan negara, yaitu ajaran agama yang diamalkan (ditaati), kekuasaan (pemerintahan) yang kuat, keadilan harus ditegakkan bagi setiap orang,

---

<sup>9</sup>Al-Mawardi, *Adabuddunya waddin*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), hlm.97.

keamanan yang menyeluruh, tanah pertanian yang subur, dan adanya cita-cita kedepan yang lebih baik.<sup>10</sup>

Hal yang tak kalah penting, yang perlu diterapkan agar warga negara sejahtera yang menjadi pertanda negara sejahtera, yaitu: jiwa yang patuh pada agama dan pemerintahan, persatuan masyarakat yang kuat dalam solidaritas sosialnya, dan materi masyarakat yang cukup atau terpenuhi.<sup>11</sup>

Memperhatikan konsep Al-Mawardi tersebut, nampak sekali bahwa ada pondasi dasar yang harus diterapkan untuk membangun negara sejahtera, dan makmurnya masyarakat. Hal ini mungkin tidak lepas dari penelaahannya mengenai gambaran konkrit kehidupan di zaman Al-Mawardi hidup, di mana makmurnya kehidupan masyarakat di zaman Khalifah Abbasiyah, dengan tumbuh atau tenggelamnya kerajaan silih berganti.

Dari uraian ringkas tentang konsep membangun negara sejahtera tersebut, maka membuat penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi. Dalam hal ini penulis beralasan untuk menelitinya karena pada dasarnya setiap pemerintahan mesti berusaha membangun negaranya agar lebih baik, untuk itu formulasi yang tepat agar arah pembangunan negara berjalan dengan baik, dan membangun negara sejahtera sebagai sebuah komitmen cita-cita, adalah hal yang mesti diusahakan dan dituju.

Dalam hal ini, Al-Mawardi telah memberikan sumbangsih pemikirannya yang patut untuk menjadi bahan rujukan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan

---

<sup>10</sup>Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, terj. Ibrahim Syuaib, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 94. Lihat: Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.206-207.

<sup>11</sup>Al-Mawardi, *Op.Cit*, hlm.121-245.

yang beragama Islam. Hal ini mungkin tidak lepas dari penelaahannya mengenai gambaran konkrit kehidupan di zaman Al-Mawardi hidup, di mana makmurnya kehidupan masyarakat dan ketaatan menjalan ajaran agama.

Oleh karena itu, penulis tertarik menelitinya lebih mendalam tentang bagaimana sebenarnya konsep membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi, baik mengenai pondasi dasar dalam membangun negara sejahtera maupun konsep dasar warga negara yang sejahtera. Dari penelitian yang diperoleh, kemudian hasilnya penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengangkat judul: **“Konsep Membangun Negara Sejahtera Menurut Al-Mawardi”**.

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Apa pondasi dasar dalam membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi?
2. Bagaimana konsep dasar warga negara yang sejahtera menurut Al-Mawardi?

#### **C. Tujuan Penelitian.**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pondasi dasar dalam membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi.
2. Untuk mengetahui konsep dasar warga negara yang sejahtera menurut Al-Mawardi.

#### **D. Signifkansi Penelitian.**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, maka diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah bagi masyarakat pembaca tentang bagaimana konsep dasar yang harus dimiliki sebuah negara untuk membangun negara yang sejahtera, baik pondasi dasar membangun negara sejahtera maupun dasar warga negara yang sejahtera.
2. Bahan informasi ilmiah dalam disiplin ilmiah kesyari'ahan, khususnya dalam bidang *siyasa* (politik Islam), yang salah satunya adalah masalah negara di mana pentingnya pondasi dasar yang kuat dalam membangun negara yang sejahtera seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Defenisi Operasional.**

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dalam judul penelitian ini, dijelaskan sebagai berikut :

1. Konsep, ialah suatu rancangan pendapat (paham) yang telah ada dalam pikiran.<sup>12</sup> Jadi maksudnya adalah suatu pendapat atau hasil pemikiran tentang suatu permasalahan dan bagaimana seharusnya dilakukan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam buku karyanya.

---

<sup>12</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm.611.

2. Membangun, ialah membentuk, mengerjakan sesuatu untuk diwujudkan, mendirikan hingga tegak.<sup>13</sup> Maksudnya ialah melakukan sesuatu agar dapat berdiri dan terwujudnya yang diinginkan. Dalam hal ini adalah membangun negara agar sejahtera.
3. Negara, ialah daerah dalam lingkungan satu pemerintahan yang teratur; persekutuan wilayah dalam suatu daerah yang tertentu batas-batasnya yang di perintah dan diurus oleh badan pemerintahan yang teratur; berkenaan pemerintahan yang unsur-unsurnya terdiri dari rakyat, lembaga pemerintahan pemimpinnya/pimpinannya, wilayah dan batasnya.<sup>14</sup> Maksudnya sekumpulan rakyat (bangsa) yang mendiami wilayah tertentu dan diorganisir di bawah pemerintahan berdaulat kedalam dan keluar, dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan, baik Presiden dan Menteri-menterinya (eksekutif/lembaga pemerintahan), Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif), lembaga peradilan (yudikatif) dan lainnya.
4. Sejahtera, ialah aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari gangguan, kesukaran); tidak kekurangan suatu apa.<sup>15</sup> Maksudnya ialah suatu kondisi kehidupan masyarakat ataupun negara yang berkecukupan segala kebutuhan pokok rakyatnya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan maksud judul penelitian ini ialah mengkaji pendapat atau hasil pemikiran dari Imam Al-Mawardi yang menjadi pemahaman didalam karya-karyanya tentang bagaimana cara yang

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.95.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.796.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 1051.

ditempuh atau dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk berdirinya dan terwujudnya rakyat dan negara aman sentosa dan makmur.

## **F. Metode Penelitian.**

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara melakukan penelitian dengan mendata, menghimpun dan mempelajari sejumlah literatur yang ada di perpustakaan mengenai permasalahan konsep membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi. Dengan sifat penelitian adalah studi literatur.

### 2. Data dan Sumber Data.

#### a. Data.

Data yang digali dalam penelitian ini adalah :

- 1) Biografi Al-Mawardi, meliputi: kelahiran, pendidikan, kiprah politiknya dan karya-karyanya.
- 2) Pondasi dasar dalam membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi.
- 3) Konsep dasar warga negara yang sejahtera menurut Al-Mawardi.

#### b. Bahan Hukum.

Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan Hukum Primer.
  - a) *Adabuddunya Waddin*, oleh Al-Mawardi.
  - b) *Al-ahkamus Sulthaniyah wal Wilayatud Diniyah*, oleh Al-Mawardi.

## 2) Sumber Sekunder

- a) *Etika Agama dan Dunia*, oleh Al-Mawardi.
- b) *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, oleh al-Mawardi.
- c) *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, oleh Aan Jaelani.
- d) *Bedah al-Ahkamussultaniyah Al-Mawardi*, oleh Nur Mufid dan Nur Fuad.
- e) *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normatif dan Historis*, oleh Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim.
- f) *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, oleh Munawir Sjadzali.
- g) *Agama dan Negara: Memahami Etika Agama dan Dunia*, oleh Muhammad Hari Zamharir
- h) *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, Muhammad al-Mubarak

## 3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data, digunakan teknik berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan pendataan dan mengumpulkan sejumlah literatur yang diperlukan yang ada di perpustakaan untuk penyusunan penelitian ini. Perpustakaan yang menjadi tempat suvey adalah perpustakaan pusat IAIN Antasari Banjarmasin.

- b. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji secara intensif dan mendalam terhadap literatur yang telah diperoleh, sehingga didapatkan *out put* terhadap data yang diperlukan tentang konsep membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi.

#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh diolah dengan teknik berikut:

- 1) *Editing*, yaitu dengan melakukan pengecekan dan penyeleksian secara selektif terhadap data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan, sehingga diketahui kekurangan dan kesalahannya, dan kemudian menyusunnya secara sistematis, sehingga diperoleh data yang valid.
- 2) *Interpretasi*, yaitu dengan memberikan penjelasan atau penafsiran seperlunya terhadap data yang kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.

##### b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu dengan melakukan pengkajian atau penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan berpegang kepada landasan teoritis yang disusun, sehingga diperoleh kesimpulan hukumnya.

#### 5. Tahapan penelitian

Untuk menyusun penelitian ini hingga menjadi skripsi yang siap di munaqasahkan, ditempuh tahapan-tahapan berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang akan diteliti dan literatur-literturnya yang diperlukan. Hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul konsep membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuannya, dan kemudian dimasukkan ke Biro Skripsi agar dapat disidangkan. Setelah dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, lalu diseminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis lebih dahulu mengurus surat risetnya dan menyampaikannya kepada perpustakaan yang menjadi tempat penelitian ini, kemudian melakukan pengumpulan data, yang dilakukan selama 1 (satu) bulan sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan secara intensif terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teknik *editing*, dan *interpretasi*, sehingga diperoleh data yang valid. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif berdasarkan hukum Islam.

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berdasarkan sistematika penulisan yang

telah disusun. Untuk kesempurnaannya, kemudian dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dengan melakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan, sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan.

### **G. Kajian Pustaka.**

Skripsi yang penulis angkat mengenai konsep membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian kepustakaan, dengan fokus dan pengakajiannya berpedoman pada buku-buku yang memuat permasalahan tersebut. Dengan literatur utama dalam penelitian ini adalah karangan Al-Mawardi, yaitu *Adabuddunya Waddin, Al-ahkamus Sultaniyah wal Wilayatudiniyah, Etika Agama dan Dunia*, dan *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*.

Literatur pendukungnya adalah: *Pertama: Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, oleh Aan Jaelani, yang menguraikan tentang bagaimana kehidupan sosial masyarakat Islam dari sudut pandangan Al-Mawardi, yang meliputi: struktur sosial masyarakat Islam, sistem sosial masyarakat Islam, moralitas individu dalam kehidupan sosial, dan solidaritas sosial. *Kedua: Bedah Al-Ahkamussultaniyah Al-Mawardi*, oleh Nur Mufid dan Nur Fuad, yang menguraikan tentang telaahan, kajian, dan masukan terhadap kitab *Al-Ahkamussultaniyah* karya Al-Mawardi khususnya dalam bidang pemerintahan Islam. *Ketiga: Studi Kepemimpinan Islam*, oleh Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, yaitu menguraikan tentang bagaimana kepemimpinan seharusnya dalam Islam, termasuk pemikiran Al-Mawardi tentang syarat kepemimpinan, tugasnya dan struktur

kepemimpinan. *Keempat: Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, oleh Munawir Sjadzali, yaitu menguraikan tentang konsep ketatanegaraan dalam Islam dengan berbagai pendapat pemikiran politik Islam, termasuk Al-Mawardi yang paling banyak diuraikan pemikiran-pemikirannya. *Kelima: Agama dan Negara*, oleh Muhammad Hari Zamharir, yaitu tentang persoalan hubungan agama dan ketatanegaraan, termasuk mengenai pemikiran politik Islam sebagai sebuah pendekatan sintesis.

Dari hasil penelusuran skripsi yang telah dimunaqasyahkan memang ada beberapa orang yang telah mengangkat pemikiran Al-Mawardi, yaitu:

*Pertama: Kementerian negara dalam pemerintahan Islam: Studi terhadap pemikiran politik Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sulthaniah*, oleh Fatimah, NIM.0001133658. Kesimpulan isi skripsi ini mengangkat tentang kedudukan menteri *Tafwidh* (Perdana Menteri) dan menteri *Tanfidz* (menteri eksekutif) dalam posisi dan kewajibannya menjalankan pemerintahan yang berada di bawah kekuasaan raja.

*Kedua: Penetapan seorang kepala negara menurut Al-Mawardi (Hak legislasi Dewan Perwakilan dalam Islam)*, oleh Jamaluddin, Nim.0001133691. Kesimpulannya tentang hak-hak yang dimiliki oleh anggota dewan perwakilan (*Ahlul Halli wal 'Aqdi*) untuk memilih kepala negara berdasarkan kriteria seorang pemimpin, dan memberhentikannya apabila dalam menjalankan tugasnya ternyata melanggar hukum Islam atau tidak mampu menjalankan tugasnya.

*Ketiga: Karakteristik Panglima Perang menurut Al-Mawardi*, oleh Ellyysa Nurmiati, Mim.0001133684. Kesimpulannya mengangkat sifat-sifat yang mesti

dimiliki seorang panglima perang, seperti pemberani, ahli berperang, dan cerdas. Sebab, dalam peperangan diperlukan pemimpin yang punya kecerdasan dan siasat yang baik. Juga wajib mengetahui aturan-aturan perang, seperti tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan dan orang tua.

*Keempat: Pemikiran Imam Al-Mawardi Mengenai Jabatan Gubernur*, oleh Normawati, NIM.0001133706. Kesimpulannya tentang jabatan gubernur yang sifatnya terbatas oleh waktu dan khusus untuk daerah jajahan yang ditunjuk langsung oleh pihak penguasa yang menjajah. Juga syarat-syarat yang mesti dimiliki untuk menduduki jabatan tersebut.

*Kelima: Sistem Sosial Masyarakat dalam Suatu Negara Menurut Pemikiran Al-Mawardi*, oleh Aminudin Kamarullah, NIM. 0101134387. Kesimpulannya, penting sekali bagi sebuah negara membangun sistem sosial yang kuat, karena akan menentukan keutuhan suatu negara. Caranya, semua unit haruslah terintegrasi dengan baik dan setiap individu harus memiliki moralitas ideal dengan menyelaraskan antara moral dunia dan moral agama. Juga perlunya kondisi negara kondusif dan pengelolaan sumber daya alamnya kaya yang merupakan modal bagi rakyatnya.

Memperhatikan skripsi-skripsi tersebut, jelas sekali berbeda dengan skripsi yang penulis angkat ini, apalagi skripsi-skripsi tersebut sumber rujukan literatur utamanya adalah dari kitab *Al-Ahkamus Sulthaniah*.

Adapun skripsi yang penulis angkat ini rujukannya adalah bersumber dari kitab *Adabuddunya Wad Din*, dengan fokus permasalahannya pada penekanan konsep membangun negara sejahtera, yang meliputi: pondasi dasar dalam

membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi, dan konsep dasar warga negara yang sejahtera menurut Al-Mawardi.

Selain itu, ketertarikan penulis permasalahan ini ternyata Al-Mawardi mempunyai pemikiran sendiri tentang pentingnya membangun dan warga negara yang sejahtera, karena menentukan kekuatan, keutuhan dan keberhasilan suatu negara. Disisi lain, para pemikir Islam sebelum dan sesudahnya kurang menyentuh persoalan mendasar tentang negara sejahtera, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu khaldun, Al-Ghazali, atau tokoh sesudahnya seperti Ali Abdul Raziq, Al-Maududi, Muhammad Husain Haikal, dan Hasan Al-Banna lebih banyak mengemukakan konsep asal-usul negara, pengangkatan kepala negara, kepemimpinan dan ketaatan kepada pemimpin, menolak adanya konsep negara dalam Islam, dan lebih memfokuskan kepada negara Islam.

#### **H. Sistematika Penulisan.**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan penelitian yang terkait dengan konsep dasar dalam membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi. Kemudian dirumuskan permasalahannya dimuat dan disusun tujuan penelitian. Selanjutnya dimuat definisi operasional. Untuk memudahkan pengumpulan dan penggalian data, maka disusunlah metode penilitan. Selanjutnya dikemukakan kajian pustaka yang menjelaskan mengenai keaslian penelitian yang penulis lakukan ini dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis, memuat tentang konsep membangun negara dalam pandangan Islam, terdiri dari: pengertian negara, dasar hukum pijakan bernegara dalam Islam, persyaratan pemimpin negara dan kewajibannya, hak politik warga negara, dan tujuan berdirinya suatu negara.

Bab III merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *Pertama*, data tentang konsep membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi, meliputi: biografi al-Mawardi, pondasi dasar dalam membangun negara sejahtera menurut Al-Mawardi, dan konsep dasar warga negara yang sejahtera menurut Al-Mawardi. *Kedua*, analisis data, yaitu mengkaji secara mendalam terhadap data yang diperoleh dengan berpedoman pada landasan teoritis yang telah disusun.

Bab IV merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri dari: simpulan dan saran.